



POLICY BRIEF

MENGOPTIMALKAN PARIWISATA BERBASIS KONSERVASI UNTUK MENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT WILAYAH PENYANGGA DI KABUPATEN PANDEGLANG

Ringkasan Eksekutif

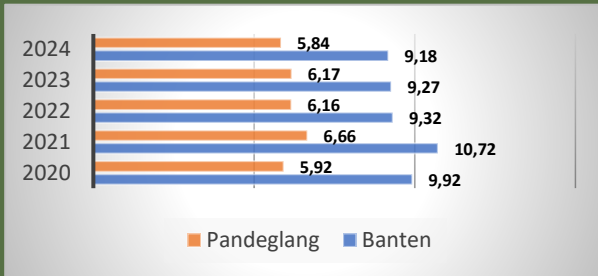
Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar pariwisata berbasis konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon, namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah penyangga. Akar masalah utama meliputi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, minimnya fasilitas publik, belum optimalnya pemanfaatan potensi ekowisata, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi pariwisata. Kondisi ini strategis karena berdampak pada tingginya kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatnya risiko tekanan terhadap kawasan konservasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan terintegrasi melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas kawasan, penguatan ekowisata berbasis keberlanjutan, serta pemberdayaan dan inklusi ekonomi masyarakat lokal. Implementasi kebijakan ini memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta masyarakat lokal, komunitas dan sektor swasta. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Masalah Utama : Ketimpangan antara besarnya potensi ekonomi pariwisata dan tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah penyangga di Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis pariwisata, khususnya melalui kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang dikenal sebagai Natural World Heritage Site yang menjadi habitat terakhir badak jawa atau badak cula satu menjadikan daya tarik wisata tersendiri. TNUK juga ditetapkan sebagai geopark melalui SK Menteri ESDM Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023 dengan tema “Jejak Tsunami Krakatau”, menggabungkan konservasi badak jawa, edukasi geologi, dan pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan. Berbagai potensi tersebut seharusnya mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada 19 wilayah penyangga kawasan konservasi di Kabupaten Pandeglang. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa potensi tersebut belum mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitar.

Grafik 1. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten



Sumber Data : BPS, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang (BPS, 2025a) dan Provinsi Banten tahun 2025(BPS, 2025b), tingkat kemiskinan di Pandeglang relatif tinggi dan konsisten berada di atas rata-rata provinsi, yakni sebesar 9,18% di tahun 2024 dibandingkan 5,84% di tingkat provinsi .

Selain itu, PDRB per kapita Pandeglang juga menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 35,9 juta rupiah pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata Provinsi Banten yang mencapai 70,2 juta rupiah.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan Pandeglang cenderung lebih rendah dan stagnan di kisaran 2,5–2,7% pada periode 2023–2024, sementara provinsi tumbuh di angka 4,7%. Tingkat pengangguran di Pandeglang juga cukup tinggi dan menduduki peringkat kedua, yakni sekitar 8%, menunjukkan terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan demikian permasalahan utama yang muncul dari analisis data tersebut adalah adanya ketimpangan antara besarnya potensi ekonomi pariwisata dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dampak

Dampak yang muncul dari permasalahan tersebut antara lain :

1. Kerentanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat di wilayah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon yang tidak bisa ditingkatkan melalui potensi ekonomi pariwisata Taman Nasional menyebabkan peningkatan kerentanan sosial dan ekonomi, yang ditandai dengan rendah dan tidak stabilnya pendapatan serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak hanya melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, seperti meningkatnya ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari, terbatasnya mobilitas sosial, serta melemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan dan perubahan.

2. Rendahnya diversifikasi ekonomi masyarakat

Keterbatasan alternatif pekerjaan serta belum optimalnya pemanfaatan sektor ekowisata, menyebabkan masyarakat cenderung mempertahankan pola mata pencaharian lama dengan produktivitas dan nilai tambah yang relatif rendah, sehingga memperlambat proses transformasi ekonomi masyarakat.

3. Potensi kerusakan lingkungan kawasan konservasi lebih besar,

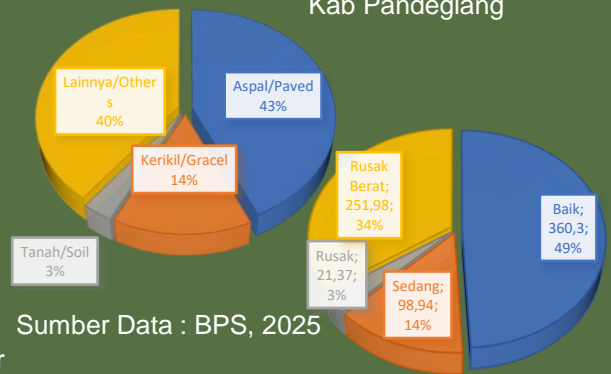
Tingginya ketergantungan terhadap sumber daya alam, dapat mendorong pemanfaatan sumber daya secara berlebihan. Kondisi ini berisiko meningkatkan potensi kerusakan lingkungan dan mengganggu keberlanjutan fungsi ekologis kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Penyebab Masalah

1. Infrastruktur dasar belum memadai

Kondisi jalan beraspal daerah Pandeglang hanya sekitar 43%. Sedangkan kondisi jalan sedang, rusak dan rusak berat mencapai sekitar 51%. Hal ini mengakibatkan rendahnya konektivitas antarwilayah, khususnya menuju Kecamatan Sumur sebagai pintu masuk kawasan wisata. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa serta mengurangi minat investasi.

Diagram 1. Kondisi Jalan Kab Pandeglang



Sumber Data : BPS, 2025

2. Fasilitas Publik Masih Minim

Minimnya fasilitas publik juga menjadi faktor penyebab signifikan kurang berjalannya ekonomi pariwisata. Tidak tersedianya rumah sakit, layanan perbankan, klinik, maupun pusat perdagangan menunjukkan bahwa kawasan ini belum memiliki dukungan layanan dasar yang memadai. Berikut data Fasilitas publik di Kecamatan Sumur yang menjadi salah satu pintu masuk TNUK Keterbatasan fasilitas ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat serta menurunkan daya tarik kawasan sebagai destinasi wisata. Menurut Rigall-I-Torrent & Fluvia (2007) bahwa ketersediaan barang publik di daerah wisata dapat mempengaruhi terhadap harga dan pendapatan.

Tabel 1. Daftar Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Infrastruktur dan Fasilitas	Jumlah
Hotel	12
Bank	0
Rumah Sakit	0
Klinik	0
Puskesmas	1
Apotik	4
Pasar	0
Pertokoan / Minimarket	2
Restoran / Rumah Makan	0

Sumber Data : BPS, 2025

3. Rendahnya Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan

Jarak dari Jakarta ke Sumur sekitar 217 km yang membutuhkan waktu 6–7 jam. Hambatan geografis yang tidak diimbangi dengan sistem transportasi yang efisien akan mengurangi daya saing destinasi wisata. Selain itu rendahnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan yang berdampak pada tingginya biaya wisata

Tabel 2. Daftar potensi wisata TNUK

4. Pemanfaatan potensi ekowisata belum optimal

Kawasan dataran TNUK seluas 61.357.46 Ha yang memiliki fitur alam dengan potensi wisata alam di berbagai lokasi. Namun jumlah kunjungan wisata masih rendah. Pada tahun 2023 hanya sekitar 15.047 kunjungan terdiri dari 14.720 wisatawan lokal dan 327 wisatawan asing (TNUK, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi wisata alam dengan tingkat pemanfaatannya.

Daya tarik wisata	Jumlah Lokasi
Air Terjun	20
Air Panas	2
Gua	5
Hidupan liar	6
Sungai	2
Bumi Perkemahan	4
Wisata Religi	8
Satwa Liar	23

Sumber Data : Statistik TNUK Tahun 2023

5. Keterlibatan masyarakat dalam rantai ekonomi pariwisata masih terbatas

Saat ini, hanya sebagian kecil kelompok masyarakat seperti Pokdarwis dan kelompok tani yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum terintegrasikan dalam aktivitas ekonomi pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata belum bersifat inklusif serta belum mampu menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Menurut data BPS (2025) penghasil sektor ekonomi di Pandeglang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

Rekomendasi Kebijakan

Akar masalah utama dari ketimpangan antara besarnya potensi ekonomi pariwisata dan tingkat kesejahteraan masyarakat belum optimalnya aksesibilitas, rendahnya inklusivitas ekonomi masyarakat, serta belum terintegrasinya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan wisata. Akibatnya, potensi pariwisata yang besar belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kementerian Kehutanan selaku pengelola Taman Nasional Ujung Kulon, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta komunitas masyarakat lainnya untuk mendukung dan membangun pengembangan pariwisata yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Pandeglang khususnya di 19 desa wilayah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Salah satu contoh pengelolaan taman nasional di Selandia Baru (*Fiordland National Park*) yang memastikan penyediaan akses jalan yang baik, seperti Milford Road, serta fasilitas umum yang memadai dapat meningkatkan daya tarik wisata tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Infrastruktur dirancang terintegrasi dan berbasis konservasi yang dapat meningkatkan kunjungan wisata hingga 1 juta pengunjung setiap tahunnya, serta berperan dalam ekonomi regional (Nicoll & Westley, 2025). Dengan demikian, berikut rekomendasi kebijakan yang diusulkan :

1. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur kawasan wisata

Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan menuju destinasi wisata, termasuk menyediakan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi, seperti bus dan kapal penyeberangan. Selain itu, penyediaan fasilitas dasar seperti toilet, klinik, jaringan telekomunikasi, dan pusat informasi wisata harus ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan dan keamanan wisatawan. Dalam jangka pendek hingga menengah, langkah ini akan menurunkan biaya perjalanan dan mengoptimalkan potensi wisata dengan peningkatan wisatawan.

2. Penguatan ekowisata berbasis ekonomi hijau dan biru

Melalui penerapan ekonomi hijau dan biru optimalisasi potensi wisata dapat dilakukan dan tetap menjaga keberlanjutan kawasan. Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merancang dan membangun kawasan konservasi dan sektor swasta dapat mengembangkan paket wisata berbasis alam yang terstandarisasi, seperti wisata bahari, konservasi, dan edukasi lingkungan. Penerapan sistem kuota kunjungan, digital booking, serta pembangunan akomodasi ramah lingkungan (*eco-lodge*) menjadi langkah penting untuk pengendalian dampak lingkungan.

3. Pemberdayaan dan inklusi ekonomi masyarakat lokal

Dinas UMKM dan Dinas Pariwisata perlu memperluas pelatihan keterampilan bagi masyarakat, tidak terbatas pada Pokdarwis dan kelompok tani. Penguatan kelembagaan lokal seperti BUMDes dan Koperasi dapat menjadi sarana untuk mengelola usaha wisata secara kolektif. Selain itu, pemberian akses permodalan, pendampingan usaha, serta promosi digital harus diperluas agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam rantai ekonomi pariwisata, seperti penyediaan *homestay*, kuliner lokal, kerajinan, dan jasa wisata. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat wilayah penyangga dapat meningkat.

Referensi :

- BPS. (2025a). *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2025*.
BPS. (2025b). *Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2025*.
Nicoll, J., & Westley, O. (2025). *Government to protect and enhance Milford Sound Piopiotahi*.
Www.Doc.Govt.Nz.<https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2025-media-releases/government-to-protect-and-enhance-milford-sound-piopiotahi>
Rigall-I-Torrent, R., & Fluvia, M. (2007). Public goods in tourism municipalities: formal analysis, empirical evidence and implications for sustainable development. *Tourism Economics*, 361–378.
TNUK. (2024). *Statistik 2023 Taman Nasional Ujung Kulon*.

Disusun oleh :
Ris Risnawijaya

Magister Ilmu Administrasi Publik
DMKP Fisipol
Universitas Gadjah Mada
2026